

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Tradisi Wayang Kulit merupakan warisan asli budaya Indonesia. Kemunculannya sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Para budayawan dalam maupun luar negeri telah mengakui wayang kulit sebagai seni yang bermutu tinggi (Haryanto, 1991). Wayang kulit merupakan ilustrasi yang menggambarkan sosok manusia dalam bentuk boneka yang menghasilkan bayang-bayang. Tidak hanya sekadar berfungsi sebagai hiburan, melainkan juga wayang kulit sebagai hasil budaya, pendidikan penerangan, serta mengajarkan nilai filosofis. Salah satu unsur budaya Jawa ini menjadi cerminan jati diri bangsa Indonesia. Wayang dijadikan media tontonan, tuntunan, dan tatanan. Sebagai media kesenian tradisional, sudah barang tentu pertunjukan wayang kulit dapat menjadi sarana menuangkan ide dan gagasan, hingga hal tersebut menjadi ajang komunikasi masyarakat dan berhubungan dengan sesamanya.

Pada dasarnya wayang kulit sebagai alat komunikasi merupakan hal yang sangat vital karena mengandung nilai dan norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Wayang kulit memiliki ikatan yang erat terhadap problematika pemerintahan, politik, sosial, budaya, maupun kepercayaan. Wayang yang notabennya berperan penting dalam kehidupan

bermasyarakat memiliki berbagai jenis, ragam, dan bentuk. Pagelaran wayang yang kerap kali dipertontonkan di Indonesia yaitu wayang kulit purwa. Wayang kulit purwa atau ringgit purwa dipentaskan berdasar cerita dari *Serat Rama* (Ramayana) dan *Baratayuda* (Mahabarata). (Geertz, 2014)

Relevan dengan era demokrasi saat ini, pagelaran wayang kulit menjadi hal yang sangat menyedihkan. Usaha pelestarian wayang terlihat semakin pasif. Budaya daerah seharusnya wajib dilindungi dan dilestarikan sebagai bentuk keasadaran kita dalam kesatuan dan persatuan bangsa. Wayang kulit sebagai budaya Jawa banyak mengandung nilai-nilai luhur yang mengajarkan berbagai aturan hidup, moral, serta etika kehidupan yang memberikan eksistensi kemajuan bangsa. Akan tetapi, di masa sekarang menunjukkan minimnya pemanfaatan pagelaran wayang kulit sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Akulturasi nilai tradisional ke dalam kehidupan modern sebagai upaya pembentukan jati diri bangsa sudah berlangsung sejak zaman Orde Lama. Seni pagelaran wayang kulit terus berkembang dari masa ke masa. Era Orde Lama yang berlangsung sejak tahun 1945, dimana kala itu Indonesia baru saja memperoleh kemerdekaan, Presiden Soekarno menghidupkan seni sekaligus mengembangkan peran wayang kulit. Antusias mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama menggarap lakon wayang, bahkan seni pedalangan yang menjadi tokoh penting dalam pementasan. Kursus pedalangan lahir pada tahun 1953 bernama “Himpunan Siswa Budaya” di kota Yogyakarta yang digurui oleh R.M Sri

Handayakusuma, Susilaatmaja, Pringga Satata beserta sejumlah Mahasiswa (Mulyono, 1982) dan beberapa tempat kursus ternama lainnya di Semarang. Salah satu momok peristiwa penting dalam perkembangan seni pedalangan wayang kulit purwa yaitu didirikannya Kongres Pedalangan Indonesia pada tanggal 23 sampai 28 Agustus 1958 di Perang Wedanan Kompleks Keraton Surakarta (Mulyono, 1982). Sejak awal 1950-an, berbagai partai politik dominan mulai membangun organisasi massa mereka, terutama Partai Komunis Indonesia (Eklöf, 2003) turut menyajikan perhatiannya kepada peran dalang wayang kulit purwa dalam memobilisasi rakyat untuk kepentingan partainya.

Setelah tragedi Gerakan 30 September 1965 berkejolak, oknum-oknum PKI diberantas, begitupun sosok dalang dalam seni pewayangan. Bagi dalang siapapun yang lolos dari penangkapan dilarang mengadakan pagelaran dalam kurun waktu tertentu. Mereka dituntut agar wajib mendaftarkan diri, melaporkan, dan menyerahkan naskah cerita yang hendak dipertontonkan (Groenendael, 1987). Intervensi pemerintah terhadap seniman dalang kian meningkat sejak lahirnya kekuasaan Orde Baru 1966. Terbukti pada saat diselenggarakan konferensi 18-19 Desember 1966, yang terdiri dari 80-an peserta menyusun organisasi pertama bagi dalang pada era Orde Baru bernama “Himpunan Kebaktian Dalang”. Tiga tahun berada di naungan Soeharto, Taman Ismail Marzuki menggelar sidang pada 25-27 Juli dalam rangka memperjelas sindikat “Peranan Dalang dan Pertunjukan di dalam Pembangunan Negara pada

Khususnya”. Pagelaran wayang kulit digunakan untuk mengemukakan pesan pembangunan yang mencakup ideologi, seosial-ekonomi, politik, kebudayaan serta pertahanan nasional.

Bercermin pada pemerintahan Orde Lama, maka alang dirancang sedemikian rupa sebagai penerang masyarakat tentang perkembangan kehidupan Bangsa dan Negara, puncaknya sebagai media yang turut mensukseskan “Rencana Pembangunan Lima Tahun” atau REPELITA (Mulyono, 1982). Pelaksanaan Repelita secara resmi ialah tanggal 1 April 1969 yang menekankan rencana pembangunan ekonomi pada sector pertanian, yang menopang kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia. Kala itu perhatian besar juga ditujukan pada kelancaran program Keluarga Berencana, yang bertujuan mensukseskan pertumbuhan ekonomi yang hendak diacapai tanpa terhambat oleh pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Atas perintah Presiden, ditegaskan bahwa dalang memiliki kedudukan istimewa dengan tugas dalang di dalam proses modernisasi mayarakat melalui pagelaran wayang kulit. Peranan dalang bukanlah sekadar menyampaikan informasi mengenai pembangunan, tetapi sekaligus menyalurkan keinginan dan harapan masyarakat dari bawah. Integritas wayang termasuk kedudukan dalang yang netral dipaksakan oleh strategi Orde Baru dalam keberlangsungan otoritas sosial dan politik.

Begitu Mayor Jenderal Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, bentuk kebijakan komunikasi massa diperketat seperti jurnalistik, *public relaions*,

penerangan, pertunjukan, propaganda, dan lain sebagainya. Khususnya teruntuk pagelaran wayang kulit sendiri di sekelilingnya berpusar kepentingan pemerintah dengan bentuk komunikasi berupa sosialisasi. Sosialisasi kerap dijadikan alat pemerintah yang ingin mempertahankan kekuasaan seseorang melalui penyampaian informasi secara sengaja kepada orang untuk menerima gagasan, aturan, nilai, dan lain-lainnya.

Orientasi dari pemerintah menjadikan dalang sebagai tokoh yang ditiru masyarakat mendorong lahirnya “Lembaga Pembina Seni Pedalangan Indonesia” atau Ganasidi yang diresmikan ketika Konferensi Pedalangan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang bertempat di Semarang pada 10-12 Juli 1969. Lembaga ini merekrut para dalang yang terbebas dari Partai Komunis Indonesia dan tidak terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Tidak lain tujuan dibentuknya Ganasidi adalah untuk membina seniman dalang agar dapat membimbing manusia yang berjiwa Pancasila. Perlahan Ganasidi berafiliasi kepada *Sad Satya Darma Dalang* yang menyangkut pokok-pokok pedoman dalang di seluruh Indonesia.

Dalam persepsi dalang, ia tidak akan mungkin membantah seruan pemerintah. Pemilihan Umum pertama di era Orde Baru, tahun 1971 dalang dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan kampanye, sehingga tidak terlihat kesesuaian cerita wayang yang sesungguhnya akibat dikemas menjadi cerita yang berisi program-program pemerintah secara terus terang. Selain itu, sebagaimana yang kita ketahui pada tahun tersebut Golongan Karya (Golkar) mendominasi kemenangan hingga Pemilu 1977

dan 1982. Keberhasilan Golkar tersebut turut menjadi salah satu target kampanye pemerintah Orde Baru kepada masyarakat, puncaknya pada Pemilu 1987. Pemerintah berharap pagelaran wayang kulit dapat membantu kelancaran Pemilu dan menghindari kritik terhadap kebijakan pemerintah, penindasan dan intimidasi pembangkang politik, serta manipulasi proses dan angka pemungutan suara, khususnya di Banyumas.

Oleh karena itu, penulis telah melakukan penelitian sejarah mengenai dinamika pagelaran wayang kulit pada zaman Orde Baru serta peranan dalang dalam suksesi pemerintah kala itu. Adapun alasan penulis memilih topik tersebut adalah karena masih sedikitnya tulisan atau penelitian yang membahas pagelaran wayang kulit sebagai alat untuk menyebarluaskan program kebijakan pemerintah Orde Baru. Selain itu, penelitian ini erat kaitannya dengan kondisi pemerintah saat ini. Pemerintah tidak lagi menggunakan pagelaran wayang kulit sebagai sarana sosialisasi pembangunan. Terbukti, hingga hari ini tidak ada aturan pemerintah yang menegaskan bahwa seniiman, khususnya dalang agar andil dalam suksesi pembangunan.

Mayoritas dalang yang disegani oleh masyarakat seharusnya menjadi tampan bagi pemerintah. Pagelaran wayang kulit alangkah baiknya hidup kembali sebagai sarana interaksi pemerintah dengan rakyatnya. Pemerintah hendaknya bercermin kepada Orde Baru, dimana kesenian wayang tumbuh subur untuk keberhasilan pembangunan terutama di daerah Jawa Tengah. Organisasi Pepadi yang saat ini masih

ada sebaiknya lebih diperhatikan seperti GANASIDI di masa Orde Baru. Alangkah baiknya jika para dalang dibina dan dibimbing kembali sebagai sosok yang Pancasila. Dengan begitu dalang akan mampu menyampaikan pesan pemerintah melalui tokoh-tokoh wayang yang dapat diteladani oleh masyarakat.

Tulisan mengenai Pagelaran Wayang Kulit di zaman Orde Baru pada dasarnya telah dilakukan oleh beberapa penulis seperti Marshall Alexander Clark dalam bukunya yang berjudul "*Wayang Mbeling: Sastra Indonesia Menjelang Akhir Orde Baru*" serta penelitian dari seorang mahasiswa Universitas Diponegoro yaitu Fadhil Nugroho Adi, dengan judul "*Peranan Dalang Wayang Kulit dalam Propaganda Pembangunan Orde Baru di Semarang*". Penelitian tersebut hanya mengkaji cara yang digunakan untuk menghindari sensor pemerintah, melalui wayang sebagai sarana ekspresi kritik sosial dan politik. Bahkan dalam buku berjudul "*Wayang Mbeling: Sastra Indonesia Menjelang Akhir Orde Baru*" merupakan hasil penulisan ulang cerita wayang yang dimanipulasi dengan bahasa satire, keluar dari pakem, dan berisi kritik tajam terhadap pemerintah. Sementara penelitian yang telah dilakukan penulis yaitu memberikan hal yang berbeda dengan melakukan penelitian mengenai peran dalang dalam pagelaran wayang kulit di zaman Orde Baru untuk kesuksesan politik pembangunan di Banyumas dari periode 1986 sampai 1990 yang ditulis menggunakan metode historis.

Sementara alasan Banyumas menjadi objek penelitian selain karena minimnya penelitian yang mengkaji di wilayah tersebut, dikarenakan Kabupaten Banyumas menjadi salah satu wilayah yang mencakup berbagai kegiatan administrasinya di bawah komando pemerintah pusat yang berada di Semarang. Unsur kebudayaan Jawa di Banyumas pun begitu kental, salah satunya adalah pagelaran wayang kulit. Dalam pelaksanaan kebijakan berbagai aspek kehidupan, yang mencakup pagelaran wayang kulit tercipta oleh ketetapan birokrat yang berada di Semarang. Sehingga, Banyumas tidak luput dari perhatian pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan pagelaran wayang kulit di masa Orde Baru. Meskipun sedikit sumber yang didapat, namun tidak heran jika di tahun-tahun tersebut Banyumas dianggap sebagai pelopor dalam suksesnya pemerintahan Orde Baru.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian dari pemikiran di atas, permasalahan yang diangkat adalah mengenai Pemanfaatan Dalang dalam Pagelaran Wayang Kulit di Banyumas sebagai Alat Keberhasilan Politik (1986-1990). Batasan tahun 1986-1990 dipilih karena pada tahun 1986 awal diselenggarakannya Pemantapan Sarasehan Dalang Seluruh Indonesia pada bulan Juli 1986. Acara tersebut menjadi akar dari organisasi-organisasi yang membina dalang dalam melakukan pagelaran atas

perintah pemerintah Orde Baru. Rentang waktu yang dipilih sampai tahun 1990 karena pada tahun tersebut merupakan puncak dari kejayaan Orde Baru.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup bidang politik dan ekonomi pada tahun 1986-1990. Pokok permasalahan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan yang difokuskan dan dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana situasi ekonomi, sosial dan politik Orde Baru di Banyumas?
2. Bagaimana seni pedalangan ketika berperan sebagai alat keberhasilan politik pembangunan Orde Baru di Banyumas?
3. Mengapa masyarakat Banyumas dapat menikmati pagelaran wayang dengan alur cerita serta lakon yang bermetafora menjadi agenda pemerintah Orde Baru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Pagelaran Wayang Kulit dan Peran Dalang sebagai Alat Keberhasilan Politik Pembangunan Orde Baru, bagaimana peran

Dalang ketika menyampaikan kebijakan Orde Baru dan untuk mengetahui bagaimana dampak dari pagelaran wayang kulit atas antusias masyarakat terhadap perhelatan Orde Baru.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pelengkap kajian sejarah nasional Indonesia, khususnya tentang pemanfaatan pagelaran wayang kulit sebagai alat kesuksesan pembangunan era Orde Baru di Banyumas.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk pengayaan dalam pembelajaran dan perkuliahan baik di tingkat Sekolah maupun di Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Khususnya kajian sejarah nasional Indonesia masa Orde Lama sampai Orde Baru.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka diperlukan metodologi sejarah untuk mengkaji penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan model deskriptif-naratif yaitu, penulis mendeskripsikan secara logis dan sistematis dalam penelitian ini (Kartodirdjo, 1992). Metode penelitian sejarah yang digunakan oleh sejarawan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian tersusun dalam empat tahapan yang mencakup Heuristik (pengumpulan sumber), Verifikasi (kritik), Interpretasi (menafsirkan), dan Historiografi (penulisan) yang diungkapkan oleh Louis Gottschalk (Gottschalk, 1986).

- Heuristic (Pengumpulan Sumber)

Tahap *pertama*, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber. Pada tahap ini, peneliti mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema penulisan baik sumber primer maupun sumber sekunder. Peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai buku-buku yang berkaitan dengan tema penulisan yang terdapat di beberapa perpustakaan seperti, Perpustakaan UNJ, Perpustakaan UI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan Daerah Purwokerto, Ruang Baca Prodi Sejarah UNJ, Museum Wayang Banyumas. Penulis juga mendapatkan Arsip dan Surat Kabar yang berasal dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Arsip Jawa Tengah.

- Verifikasi (Kritik)

Kedua, verifikasi atau kritik sumber. Pada tahap ini peneliti mengkaji dan mengkritik sumber yang telah didapatkan. Kritik

dilakukan untuk menguji autentisitas (kritik ekstern) dan kredibilitas (kritik intern) sumber tersebut (Kuntowijoyo, 2013). Uji autentisitas (kritik ekstern) yaitu, melakukan uji atas keaslian yang meliputi kapan, dimana, siapa, mengapa, dari bahan apa sumber itu dibuat. Sedangkan uji kredibilitas (kritik intern) yaitu, penulis melakukan uji analisis dengan membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lainnya.

- Interpretasi (Menafsirkan)

Ketiga, interpretasi atau penafsiran. Pada tahap ini peneliti menafsirkan fakta-fakta historis dari sumber sejarah yang telah diverifikasi sebelumnya. Interpretasi merupakan bagian penting untuk menghasilkan fakta sejarah.

- Historiografi

Keempat, tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah ini adalah historiografi, yaitu mengungkapkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan jelas sesuai kaidah penelitian ilmiah (Kuntowijoyo, 2013). Tahapan ini merupakan tahapan yang penting dalam menjelaskan topic penelitian, sehingga penelitian ini terlihat jelas dan mudah dimengerti, dan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan di dalam rumusan masalah di atas.

2. Sumber Penulisan

Sumber penelitian yang digunakan dalam penulisan ini didapatkan dari buku-buku terkait yang membahas tentang Orde Baru dan buku-buku yang membahas tentang Pagelaran Wayang Kulit, Seniman Dalang, kebijakan Orde Baru dan beberapa dokumen yang menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapatkan dari wawancara dengan saksi maupun tokoh terkait seperti Ki Dalang Kedot Suprpto sebagai seniman dalang yang pernah mementaskan wayang kulit di zaman Orde Baru serta dokumen atau arsip yang memuat atau berhubungan dengan pagelaran wayang kulit Orde Baru dan kebijakan Orde Baru di Indonesia.

Dalam tahap penulisan ini, penulis menggunakan sistematika penulisan dengan lima bab, yaitu:

BAB I – PENDAHULUAN

- A. Dasar Pemikiran
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Metode Penelitian dan Sumber

BAB II – BERSEMINYA POLITIK ORDE BARU

- A. Sejarah Singkat Banyumas
- B. Pagelaran Wayang Kulit Purwa

C. Perhelatan Kebijakan Orde Baru

BAB III – PAGELARAN WAYANG KULIT 1986-1990

A. Dalang Dalam Pusaran Orde Baru

B. Teknik Pagelaran Wayang Kulit 1986-1990

C. Penyampaian Pesan Pembangunan

BAB IV – PAGELARAN WAYANG DAN KEBERHASILAN DI BANYUMAS

A. Kesuksesan Pemerataan Pembangunan

B. Kesuksesan Pertumbuhan Penduduk

C. Kuningisasi Banyumas

BAB V – KESIMPULAN

Selain sumber primer, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber sekunder yang didapatkan dari berbagai literatur berupa buku yang relevan dengan pagelaran wayang kulit di masa Orde Baru seperti karangan penulis Victoria M. Clara van Groenendael yaitu *Dalang di Balik Wayang*, buku *Ensiklopedia Wayang Indonesia Jilid 1-6*, buku Jusuf Wanandi berjudul *Menyibak Tabir Orde Baru (Memoar Politik Indonesia 1965-1998)*, seri buku *Tempo Soeharto*, dan lain sebagainya.